

Analisis Implementasi Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Pada Rumah Sakit Daerah Kalisat - Jember

(The Analysis of Financial Management Pattern- Local Public Service Agency Implementation At Rumah Sakit Daerah Kalisat - Jember)

Nurul Jahra

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)

Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

E-mail : nurul_jahra@yahoo.com

Abstrak

Demi meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit di Indonesia, salah satu upaya pemerintah adalah memberlakukan sistem Badan Layanan Umum (BLU). Sehingga rumah sakit pemerintah di seluruh Indonesia dituntut untuk menerapkan sistem badan layanan umum ini. Rumah Sakit Daerah Kalisat merupakan salah satu Rumah Sakit Daerah di Kabupaten Jember yang telah mengimplementasikan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) sejak tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan pengaruh Implementasi PPK BLUD di RSD Kalisat – Jember. Sehingga dapat diketahui apakah terdapat pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, kinerja pelayanan serta kinerja mutu dan manfaat bagi masyarakat sebelum dan sesudah RSD Kalisat menerapkan PPK BLUD. Data yang digunakan meliputi Laporan Keuangan, Laporan Tahunan tahun 2008 dan 2009, periode sebelum penerapan PPK BLUD dan tahun 2010, 2011, 2012 periode PPK BLUD sudah diterapkan. Berdasarkan analisis didapatkan bahwa secara keseluruhan PPK BLUD berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan, kinerja pelayanan serta kinerja mutu dan manfaat bagi masyarakat sesudah penerapan PPK BLUD.

Abstract

In order to improve the quality of hospital services in Indonesia, one of the government's efforts is a system of Public Service Agency (BLU). So the government hospitals in Indonesia are required to implement this system public service agency. The purpose of this study was to describe public services agency implementation activities at the hospital. Rumah Sakit Daerah Kalisat is one of the public hospital in Jember has implemented as a Financial Management Pattern- Local Public Service Agency (PPK BLUD) since 2010. This research was conducted in order to assess the influence of implementation of PPK BLUD on RSD Kalisat – Jember. So that can be known whether there is a significant influence in financial performance, service performance and quality and advantageous public before and after applying the PPK BLUD. The data used in the form Financial statements RSD Kalisat and End Year Statetements RSD Kalisat in 2008 and 2009 which is the year prior to application of PPK BLUD and in 2010, 2011, 2012 which is the year after implementation of PPK BLUD. Based on analysis found that in general PPK BLUD effects to the financial performance, service performance and quality and advantageous public before and after applying the PPK BLUD

Keywords : *Implementation, Financial Management Pattern- Local Public Service Agency (PPK BLUD), Financial performance, Service performance, Service quality and advantageous public, Independent sample T Test*

Pendahuluan

Sejak dua dekade terakhir, pelaksanaan reformasi

administrasi publik makin nyata di berbagai negara termasuk Indonesia. Doktrin *New Public Management* (NPM) atau *Reinventing government* yang didasarkan atas pengalaman

negara-negara Eropa, Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru secara berangsur-angsur diadopsi kedalam manajemen pemerintahan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Transformasi manajemen pemerintahan dalam *New Public Management* mulai dari penataan kelembagaan, reformasi kepegawaian, dan reformasi pengelolaan keuangan negara (Mahmudi, 2003)

Di dalam doktrin NPM tersebut pemerintah dianjurkan untuk meninggalkan paradigma-paradigma administrasi nasional yang cenderung mengutamakan sistem dan prosedur birokratis yang tidak efisien, pemberian pelayanan yang lambat serta tidak efektif, dan menggantikannya dengan orientasi pada kinerja dan hasil. Pemerintah dianjurkan untuk melepaskan diri dari birokrasi klasik dengan mendorong organisasi dan pegawai agar lebih fleksibel, dan menetapkan tujuan, serta target organisasi secara lebih jelas sehingga memungkinkan pengukuran hasil. Melalui reformasi ini pemerintah diharapkan menerapkan praktek manajemen strategi melalui sistem anggaran berbasis kinerja dan akuntansi berbasis *accrual*.

Indonesia telah mengadopsi pemikiran NPM dengan melakukan reformasi keuangan negara yang mulai bergulir sejak akhir tahun 2003, dengan dikeluarkannya tiga paket peraturan keuangan negara yang baru, yaitu UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 tahun 2005 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara. Dengan ketiga paket peraturan keuangan negara tersebut telah merubah mindset atau pola pikir yang lebih efisien, profesionalitas, akuntabel, dan transparan, dengan melakukan perubahan dari penganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja, yang membuka koridor bagi penerapan basis kinerja di lingkungan pemerintah. Dengan basis kinerja ini, arah penggunaan dana pemerintah menjadi lebih jelas yang hanya mempunyai input dan proses sekarang menjadi berorientasi pada output. Perubahan ini sangat berarti mengingat kebutuhan dana yang semakin tinggi, sedangkan sumberdaya yang dimiliki pemerintah terbatas (Ahmad Hag, 2009)

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel, berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas melalui Badan Layanan Umum (BLU). BLU pada dasarnya adalah alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil, profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi. Untuk dapat menjadi BLU, suatu instansi harus memenuhi tiga persyaratan pokok, yaitu persyaratan substantif, yang terkait dengan penyelenggaraan layanan umum, persyaratan teknis yang terkait dengan kinerja pelayanan dan kinerja keuangan, serta persyaratan administratif terkait dengan terpenuhinya dokumen seperti pola tata kelola, rencana strategi bisnis, standar pelayanan minimal, laporan keuangan pokok, dan laporan audit atau pernyataan bersedia untuk diaudit.

Rumah sakit sebagai salah satu institusi pelayanan publik memegang peranan penting bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Rumah sakit dituntut untuk dapat melayani masyarakat, dapat berkembang dan mandiri serta harus mampu bersaing dan memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat. Dengan semakin tingginya tuntutan bagi rumah sakit untuk meningkatkan pelayanannya, banyak permasalahan yang muncul terkait dengan terbatasnya anggaran yang tersedia bagi operasional rumah sakit, alur birokrasi yang terlalu panjang dalam proses pencairan dana, aturan pengelolaan keuangan yang menghambat kelancaran pelayanan dan sulitnya mengukur kinerja, sementara rumah sakit memerlukan dukungan sumber daya manusia, teknologi dan modal yang sangat besar. Melalui konsep pola pengelolaan keuangan BLU ini rumah sakit diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme, mendorong *enterpreureship*, transparansi, dan akuntabilitas dalam rangka pelayanan publik, sesuai dengan tiga pilar yang diharapkan dari pelaksanaan PPK BLU ini, yaitu mempromosikan peningkatan kinerja pelayanan publik, fleksibilitas pengelolaan keuangan dan tata kelola yang baik (Sri Mulyani, 2007)

Rumah Sakit Daerah Kalisat, sebagai salah satu sub sistem penyelenggaraan peningkatan kesehatan memiliki peran dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui tenaga dokter yang profesional, peralatan medis, pelayanan laboratorium, farmasi, pelayanan keperawatan, penelitian dan pendidikan tenaga dokter dan paramedis. Karena sangat pentingnya peranan rumah sakit ini dalam sistem kesehatan masyarakat, maka diperlukan pendekatan terpadu untuk melakukan kegiatan secara ekonomis, efisien, efektif. Sebagai lembaga yang padat modal, padat karya, dan padat ilmu serta teknologi, rumah sakit ini memerlukan profesionalisme yang handal dalam pengelolaan bisnis modern. Melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK- BLU), Rumah Sakit Daerah Kalisat diharapkan mampu meningkatkan kinerja pelayanannya kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

Metode Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang diperlukan antara lain :

1. Laporan Kinerja Non Keuangan (Tahun 2008 s/d 2012)
2. Laporan Keuangan (Tahun 2008 s/d 2012)

Lokasi dan Obyek Penelitian

Lokasi dan obyek penelitian ini adalah Rumah Sakit Daerah Kalisat – Jember , dan obyek yang diteliti adalah individu yang kompeten dalam penyusunan laporan kinerja keuangan, kinerja pelayanan dan kinerja mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

1. Variabel Kinerja Keuangan

- a. Return On Investment
- b. Cash Ratio
- c. Current Ratio
- d. Collection period
- e. Inventory Turnover
- f. Total asset Turnover
- g. Ratio Modal sendiri terhadap Asset

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Statistik Deskriptif. Statistik deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan (Supomo dan Indrianto, 2002). Statistik deskriptif dalam penelitian ini berupa ukuran tendensi sentral variabel-variabel yang diujikan.

2. Variabel Kinerja Pelayanan

- a) Rata-rata kunjungan rawat jalan perhari
- b) Rata-rata kunjungan rawat darurat perhari
- c) Hari perawatan
- d) Pemeriksaan Radiologi perhari
- e) Pemeriksaan Laboratorium perhari
- f) Rata-rata operasi perhari
- g) Rata-rata rehab medik perhari
- h) Rasio Pasien Rawat Jalan dengan dokter dan Perawat
- i) Rasio Pasien Rawat Inap dengan dokter dan perawat
- j) Bed Occupancy Rate (BOR)
- k) Average Length of Stay (ALOS)
- l) Bed Turn Over (BTO) Turn Over Interval (TOI)
- m) Sales Growth
- n) Program pendidikan dan pelatihan
- o) Penghargaan dan sanksi
- p) Pengembangan produk baru pelayanan
- q) Pengembangan sistem management
- r) Peningkatan penguasaan teknologi
- s) Rancangan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)
- t) Laporan Triwulanan
- u) Laporan Tahunan

2. Pengujian Hipotesis

Jika data berdistribusi normal, maka dilakukan uji statistik dengan metode parametrik dengan menggunakan Independent sample T-test. Namun apabila data tidak berdistribusi normal, maka akan dilakukan uji statistik dengan menggunakan metode non parametrik yaitu menggunakan uji Mann Whitney.

Pengambilan keputusan dengan menggunakan uji statistik Independent Sample T- test (Santoso, 2001) berdasarkan nilai probabilitas :

Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima

Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak

Namun jika uji statistik menggunakan uji Mann Whitney, maka dalam uji tersebut keputusan diambil berdasarkan pada nilai *signifikansi* dari masing-masing pengujian dengan ketentuan sebagai berikut :

Jika Sig $> 0,05$ H_a diterima

Jika Sig $< 0,05$ H_a ditolak

Pengujian menggunakan dengan *independent sample T test* atau dengan Mann Whitney dilakukan dengan membandingkan antara waktu sebelum dan sesudah dilakukannya implementasi PPK-BLU yaitu :

3. Variabel Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat Bagi Masyarakat

- a) Emergency Response time rate
- b) Angka Kematian di Gawat Darurat
- c) Angka Kematian Netto
- d) Angka Pasien Rawat Inap yang ditujuk
- e) Post Operative death rate
- f) Angka Infeksi Nosokomial
- g) Kecepatan pelayanan resep obat jadi
- h) Pembinaan kepada Puskesmas dan sarana kesehatan lain
- i) Waktu tunggu sebelum operasi
- j) Penyuluhan kesehatan
- k) Rasio tempat tidur kelas III
- l) Pemanfaatan TT (BOR) kelas III
- m) Prosentase pasien tidak mampu
- n) Prosentase komplain
- o) Lama waktu tunggu di poliklinik
- p) Kemudahan Pelayanan
- q) Kebersihan Lingkungan
- r) Hasil Uji AMDAL

1. Variabel Kinerja Keuangan 2 tahun sebelum (2008) (2012) implemtasi

2. Variabel Kinerja Pelayanan 2 tahun sebelum (2008) 2 tahun sesudah (2012) implemtasi

3. Variabel Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat bagi Masyarakat 2 tahun sebelum (2008) 2 tahun sesudah (2012) implemtasi

Metode Analisis Data

1. Uji Statistik Deskriptif

Hasil Penelitian

Tabel 1. Hasil Analisis Total One Sample Kolgomorof-Smirnof Test

	Kinerja Keuangan	Kinerja Pelayanan	Mutu Pelayanan dan Manfaat
N	28	80	72
Normal Parameter a.b.			
Mean	1.0179	1.0175	1.5799
Std Deviation	1.0590	.66137	1.100190
Most Extreme differences			
Absolute	.261	.130	.201
Positive	.261	0.101	0.201
Negative	-.168	-.130	-.168
Kolgomorof Smirnov Z	1.379	1.160	1.709
Asymp. Sig (2-taile)	.045	.136	.006

a. Test distribution is Normal

b. Calculated from data

Berdasarkan hasil analisis Tabel 1 dengan uji t diperoleh hasil yang dapat dinyatakan :

- 1) Pengaruh Implementasi Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum terhadap Kinerja Keuangan RSD Kalisat : Hasil Signifikansi yang diperoleh sebesar 0,045. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga uji yang dilakukan untuk melihat adanya pengaruh kinerja keuangan dilakukan dengan menggunakan Uji Mann Whitney dengan pengambilan keputusan sebagai berikut
 - Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya terdapat perbedaan kinerja antara dua tahun yang dibandingkan dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa implementasi (PPK BLU) memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan RSD Kalisat
 - Jika $\text{Sig} > 0,05$ H_0 diterima, artinya tidak terdapat perbedaan nilai kinerja keuangan antara dua tahun yang dibandingkan dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa implementasi (PPK BLU) tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan RSD Kalisat
- 2) Pengaruh Implementasi Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum terhadap Kinerja Pelayanan RSD Kalisat : Hasil Signifikansi yang diperoleh sebesar 0,136. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga uji yang dilakukan untuk melihat adanya pengaruh kinerja keuangan dilakukan dengan menggunakan Uji Mann Whitney dengan pengambilan keputusan sebagai berikut
 - Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya terdapat perbedaan kinerja antara dua tahun yang dibandingkan dalam hal ini dapat

disimpulkan bahwa implementasi (PPK BLU) memberikan pengaruh terhadap kinerja Pelayanan RSD Kalisat

- Jika $\text{Sig} > 0,05$ H_0 diterima, artinya tidak terdapat perbedaan nilai kinerja keuangan antara dua tahun yang dibandingkan dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa implementasi (PPK BLU) tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja Pelayanan RSD Kalisat
- 3) Pengaruh Implementasi Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum terhadap Kinerja Pelayanan RSD Kalisat : Hasil Signifikansi yang diperoleh sebesar 0,006. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga uji yang dilakukan untuk melihat adanya pengaruh kinerja keuangan dilakukan dengan menggunakan Uji Mann Whitney dengan pengambilan keputusan sebagai berikut
 - Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya terdapat perbedaan kinerja antara dua tahun yang dibandingkan dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa implementasi (PPK BLU) memberikan pengaruh terhadap kinerja Pelayanan Mutu Pelayanan dan Manfaat bagi Masyarakat di RSD Kalisat
 - Jika $\text{Sig} > 0,05$ H_0 diterima, artinya tidak terdapat perbedaan nilai kinerja keuangan antara dua tahun yang dibandingkan dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa implementasi (PPK BLU) tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat bagi Masyarakat di RSD Kalisat

Pembahasan

Implementasi PPK-BLU terhadap ketiga variabel yang diteliti memberikan dampak yang positif, ini terbukti dengan semakin meningkatnya skor penilaian pada ketiga variabel tersebut. Ini disebabkan karena BLU yang cenderung memiliki persamaan karakteristik dengan perusahaan nirlaba, serta adanya ketentuan bahwa BLU mengikuti standar akuntansi keuangan bukan standar akuntansi pemerintahan. Dengan demikian, implementasi PPK-BLU dalam pengelolaan keuangan dan pelaporannya akan mengacu pada PSAK No. 45 yaitu untuk perusahaan nirlaba. Konsekuensi yang lain dari perubahan menjadi BLU adalah rumah sakit harus melakukan penyesuaian dalam penyusunan anggaran, penetapan tarif, dan lain-lain yang harus berbasis pada kinerja. Pelaporan harus memiliki akuntabilitas yang tinggi dengan adanya tuntutan bahwa laporan keuangan harus diaudit oleh audit independen. Dengan menjadi BLU ini diharapkan rumah sakit menjadi suatu organisasi yang memiliki tata kelola yang transparansi dan *auditable* sehingga akan berujung pada peningkatan kualitas layanan yang memberi kepuasan kepada pasien. Sehingga dampak terhadap kinerja keuangan, kinerja pelayanan dan mutu layanan dan manfaat terlihat terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Kesimpulan dan keterbatasan

Kesimpulan

Berdasarkan analisa hasil dan pembahasan yang telah dilakukan pada Rumah Sakit Daerah Kalisat kaitannya dengan adanya penerapan PPK-BLU, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK – BLU) memberikan pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember .
2. Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK – BLU) memberikan pengaruh terhadap Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember .
3. Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK – BLU) memberikan pengaruh terhadap Mutu Layanan dan Manfaat di Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember.
4. Penerapan PPK BLUD yang memberikan fleksibilitas dan keluasaan dalam pengelolaan keuangan memberikan kemudahan bagi RSD Kalisat – Jember. Terlihat dari kenaikan kinerja keuangan, kinerja pelayanan, serta kinerja mutu dan manfaat bagi masyarakat RSD Kalisat sesudah menerapkan PPK BLUD dibandingkan sebelum menerapkan PPK BLUD. Hal ini disebabkan karena Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) telah menerapkan PSAK 24 sehingga penyajian laporan keuangan lebih memiliki akuntabilitas yang tinggi , transparansi dan auditable yang berujung pada penetapan tariff dan penyusunan anggaran yang berbasis kinerja. Selain itu BLUD memberikan kemudahan dalam menyediakan sarana dan prasarana pelayanan pasien, membuat jumlah kunjungan pasien RSD Kalisat mengalami kenaikan sehingga mempengaruhi nilai BOR, TOI, BTO, ALOS, GDR, dan NDR. Semakin tinggi kenaikan kunjungan semakin besar pendapatan yang diperoleh Rumah Sakit . Kondisi tersebut menggambarkan bahwa implementasi PPK BLUD memberikan kemudahan RSD Kalisat dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Keterbatasan Penelitian

Ada beberapa keterbatasan penelitian antara lain:

1. Untuk menganalisis kinerja keuangan, kinerja pelayanan serta kinerja mutu dan manfaat bagi masyarakat hanya menggunakan indikator – indikator yang terdapat dalam Kepmenkes No.550/Menkes/SK/VII/2009
2. Penelitian ini hanya mengambil data internal RSD Kalisat saja, sehingga informasi yang diperoleh hanya sebatas analisis dokumen dari pihak internal RSD Kalisat – Jember

Daftar Pustaka

- Bastian Indra, 2001. Akuntansi Sektor Publik, BPFE Yogyakarta.
- Bastian, Indra.2008. Akuntansi Kesehatan Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Haidir, Iman.2010. Teseis Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan dengan Menggunakan Rasio pada RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dan RS Kanker Darmais sebelum dan sesudah Penerapan PPK BLUD
- Kaplan, Robert S Norton, david P, 2000. Menerapkan Strategi Menjadi aksi Balance Score Card . Penerbit Erlangga, Jakarta
- Keputusan Menteri BUMN No. 100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Kesehatan BUMN.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nrgara No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Febriana, Dian. 2004. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Underpricing Saham pada Perusahaan Go Public di BEJ (2000-2002)*. Skripsi. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
- Mardiasmo.2006.Akuntansi Sektor Publik . Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP AMP YKPN Yogyakarta
- Mahmudi. 2003. New Public Management (NPM) : Pendekatan Baru Manajemen Sektor Publik. Diakses 10 Februari 2011 Jam 09.00 , <http://journal.vii.ac.id/index.php/sinerji/artikel>
- Meidyawati. 2008. Tesis Implementasi Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) Pada Rumah sakit Stroke Nasional Bukittinggi, Universitas Andalas
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/ 2008 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum.
- Sie Infokum- Ditama Binbangkum. 2009. Badan Layanan Umum Diakses Tanggal 25 Juli 2011 Jam 9.15 , <http://www.jdih.bpk.go.id>
- Supriatna, Dadan. 2007. Tesis Analisis Kesiapan RSUD Kota Bandung dalam rangka menuju BLUD, Universitas Pajajaran Bandung
- Supriyanto, Joko dan Riyanto. 2005. Badan Layanan Umum : Sebuah Pola Pemikiran Baru atas Unit Pelayanan Masyarakat, diakses 10 Januari 2010 jam 11.00 , <http://www.perbendaharaan.go.id>